

# **PESANTREN; AKAR TRADISI DAN MODERNISASI**

**Zaki Ghufron**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
zakighufron@yahoo.com

## **Abstract**

*Islamic Boarding school is an islamic education institution which has an identical tradition in indonesian muslim societuy. This institution has emerged long before the colonialism era in Indonesia. In its long history since years to pursue the concept of modernism, islamic boarding school, sometimes ,has also been perceived negatively because of transnasionalism ideology which is adopted in recent years. In that case, this paper aimed to describe the existence of islamic boarding school in indonesian social life. By argumenting and comparing some previous studies in this case to gain an accurate result. Moreover, this paper is intended to answer some western perception about islamic boarding school in Indonesia, and finally emphasize the role of islamic boarding school as a government partner and its function in creating democracy.*

**Keyword:** *islamic boarding school, tradition, modernization.*

## **Abstrak**

*Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Lembaga ini telah menunjukkan eksistensinya jauh sebelum era penjajahan, dan telah mengalami berbagai macam reformasi dan modernisasi sistem pembelajaran yang dianutnya. Dalam perjalanan panjangnya sebagai langkah modernisasi sistem pembelajaran dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk masyarakat Indonesia, pesantren juga tidak lekang dari isu dan ideologi transnasional, yang mengakibatkan munculnya stereotype dan tidak berdasar pada argumentasi yang memadai sebagai landasan pandangan terhadap*

*dunia pesantren, khususnya di Indonesia. Pembahasan ini diarahkan untuk menjelaskan keberadaan dan posisi dunia pesantren yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, melalui deskripsi yang komprehensif dan berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu berkenaan dengan ideologi dan sistem pembelajaran yang dianut oleh beberapa pesantren di Indonesia. Selain itu juga, pembahasan ini berusaha membantah pandangan komunal dunia Barat terhadap pesantren, sekaligus memberi kesimpulan bahwa pada kenyataannya sebagian besar pesantren di Indonesia masih berada di pihak pemerintah, dan turut serta dalam penegakan demokrasi di Tanah Air.*

**Kata kunci:** *pesantren, tradisi, modernisasi*

## **A. Pendahuluan**

Lembaga pendidikan Islam “madrasah” dimasa kontemporer ini telah menarik perhatian dunia internasional. Hal ini -dalam pandangan Arief Subhan- terjadi dan disebabkan oleh dua peristiwa penting yang muncul di dunia Islam. *Pertama*, munculnya kelompok muslim Taliban di Afghanistan pada 1994. Taliban mengidentifikasi dirinya sebagai muslim Sunni yang memiliki keterkaitan akar dengan madrasah Deoband, sebuah lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada 1867 di Delhi. Keberhasilan Taliban menyingkirkan kelompok pejuang Mujahidin dari kursi pemerintahan di Afghanistan pada 27 September 1996 semakin menyedot perhatian internasional. *Kedua*, tragedi 11 September 2001, yang dikenal dengan “9/11” di Amerika Serikat, Negara adidaya yang melibatkan diri dalam konflik-konflik internasional, terutama di Timur Tengah.<sup>1</sup> Tragedi itu membuka munculnya pertanyaan tentang Islam, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan keterkaitannya dengan proses pendidikan. Di mana lembaga pendidikan Islam menerima stigma sebagai “*fundamentalist schools*” dan “*universities of jihad*”.<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tidak luput dari perhatian Barat. Media

Barat mencitrakan pesantren sebagai tempat pertumbuhan radikalisme dan militansi Islam, terlebih lagi setelah kejadian bom Kuta Bali pada 2002. Pada September 2003, untuk menyebut contoh, *Journal of Asian Affairs* menuduh bahwa pesantren Indonesia sama dengan madrasah di Pakistan. Dikatakan bahwa, “*like Pakistan madrassa, there exists an entire education system, the ‘pesantren’, which is independent of the government and provide with Islamic fertile ground to train the children of the poor in the mould of radical Islam.*” Secara khusus Pesantren al-Mukmin Ngruki, yang berlokasi di salah satu pusat kebudayaan Jawa di Solo-mengutip International Crisis Group (ICG)-sebagai pusat jaringan muslim militan di Indonesia yang secara internasional merupakan jaringan al-Qaeda.<sup>3</sup> Dapat dikatakan, pencitraan media Barat ini memberi dampak yang tidak baik untuk dunia pesantren di Indonesia.

Pada umumnya sorotan dunia internasional dan *stereotype* yang disematkan pada dunia pesantren di Indonesia tidak diimbangi dengan suatu pemahaman yang komprehensif, atau dalam arti lain tidak bersedia memahami keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Dalam hal ini, terdapat kesan bahwa sorotan tersebut hanya didasarkan pada asumsi yang salah tentang pencitraan dan *stereotype* lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana telah diperlihatkan oleh media massa Barat.<sup>4</sup> Meskipun pada beberapa kasus, terutama pasca keruntuhan era Soeharto, ada indikasi keterkaitan antara ‘oknum’ dari dunia pesantren dengan isu radikalisme, militansi, atau konflik antar agama. Akan tetapi hal itu tidak serta merta dapat dijadikan argumentasi untuk pandangan komunal terhadap dunia pesantren.

Pasca turunnya Soeharto dari kursi presiden, reformasi dan transformasi tidak hanya berlaku dalam dunia politik saja, namun juga terjadi pada setiap aspek sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di era ini, masyarakat Indonesia diberi kebebasan yang begitu luas dalam beraspirasi dan berpendapat, termasuk dalam pandangan keagamaan, yang pada akhirnya merupakan momentum yang tepat untuk tumbuh kembangnya paradigma-paradigma keagamaan di dalam masyarakat. Perubahan pada era reformasi memberikan peluang untuk setiap masyarakat Indonesia, termasuk kelompok-

kelompok tertentu, untuk dapat berperan secara aktif dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik, setelah sekian lama terbelenggu oleh rezim Soeharto. Kelompok tersebut yang dalam terma Weber dikenal dengan “disenchantment” atau kekecewaan pasca era Soeharto.<sup>5</sup> Isu-isu keagamaan seperti isu radikalisme, seruan jihad, implementasi hukum syariah, aksi *sweeping*, gaya dan corak berpakaian, dan lainnya, telah mewarnai kehidupan masyarakat muslim Indonesia.<sup>6</sup> Bahkan menurut survey yang telah dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terindikasi peningkatan radikalisme Islam di Indonesia pasca Soeharto, selain jugakuatnya dukungan terhadap gerakan islamisme Indonesia.<sup>7</sup> Oleh karenanya dapat dimaklumi jika pada era ini, beberap figur tokoh dari kalangan muslim menjadi semakin terkenal, seperti: Habib Rizieq Shihab dari Front Pembela Islam (FPI), Abu Bakar Ba’asyir dari Jamaah Islamiyah (JI) dan Majelis Mujahidin, Agus Dwi Karna dari Laskar Jundullah nama lain dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan Ja’far Umar Thalib dari Laskar Jihad.<sup>8</sup> Di mana figur-figur ini dalam pandangan dunia Barat identik dengan golongan Islam konservatif, dan dianggap memiliki keterkaitan dengan beberapa kejadian atau konflik yang bersifat agama.

Kondisi semacam ini tentu sajaisangat Ironis dan kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi di dalam dunia Islam, khususnya Indonesia. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di Kairo, pada tanggal 4 Juni 2009, yang menyebutkan Islam memiliki tradisi yang membanggakan terutama tentang toleransi. Spirittoleransi Islam yang terjadi di Indonesia dapat digunakan sebagai model untuk melakukan promosi dan peningkatan kemerdekaan agama di dunia. Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada beberapa tahun sesudahnya, berhasil menerima *The World Statesman Award* dari New York-based interfaith organization Appeal of Conscience Foundation.<sup>9</sup> Meskipun keberhasilan ini juga tidak lekang dari aksi protes dan kritik terhadap kepemimpinan SBY yang dianggap gagal dalam mengantisipasi dan menangani kasus-kasus intoleransi agama.

Tradisi pesantren sebagaimana pernyataan Dhofier, merupakan sistem pendidikan Islam yang tumbuh sejak awal kedatangan Islam di Indonesia, yang dalam perjalanan sejarahnya

telah menjadi obyek penelitian para sarjana yang mempelajari Islam di wilayah ini.<sup>10</sup> Problem radikalisme dan kekerasan yang berhubungan dengan agama juga telah ditelusuri oleh para sarjana Barat dan Indonesia sampai ke pesantren, dalam rangka refleksi terhadap potensi pesantren dalam mempersiapkan para santrinya untuk menghadapi kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Sehingga sampai pada kesimpulan, bahwa pendidikan pesantren masih berada di bawah standar, minim pendanaan, dan diisi oleh guru yang memiliki kualitas rendah. Pesantren dalam hal ini tidak memiliki kelayakan untuk melahirkan generasi yang memiliki kapabilitas untuk memberi kontribusi kreatif pada proses modernisasi dan transformasi sosial di negaranya. Hal ini disebabkan oleh persoalan modernisasi itu sendiri yang masih membelenggu pesantren.<sup>11</sup>

Reformasi dan modernisasi lembaga pesantren di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan konfrontasi dari kalangan masyarakat Muslim, sehingga sejak era kolonialisme sistem pendidikan masyarakat pribumi ini termarginalkan. Untuk tahapan selanjutnya, dunia pesantren menyadari pentingnya reformasi pendidikan, hal ini juga berkaitan erat dengan kebangkitan institusi pendidikan Islam di beberapa negara seperti Pakistan dan Iran, di tambah lagi kemunculan sekolah-sekolah Islam di beberapa negara Barat. Meskipun reformasi pendidikan ini lebih mengarah pada eksklusivisme dan intoleransi.<sup>12</sup> Pendidikan Islam tetap digambarkan sebagai sistem pendidikan yang tidak dapat menyiapkan siswa untuk menghadapi kemajuan dunia modern.

Pesantren selayaknya lembaga lain yang berusaha untuk menyediakan pendidikan, dan sesuai dengan kutipan Sirozi, "*Education is about opening doors, opening minds, opening possibilities,*"<sup>13</sup> di mana tradisi pesantren masih belum menemukan formulasi yang baku untuk melakukan reformasi dan modernisasi. Dalam konteks ini, ada kemungkinan dalam dunia pesantren, pada beberapa kasus, telah dimasuki oleh isu-isu radikalisme. Terlebih lagi, beberapa figur Muslim militan menyadaribetul keberadaan pesantren bagi masyarakat muslim di Indonesia, sehingga mereka mulai menjadikan lembaga pendidikan Islam ini wadah untuk kaderisasi dan transformasi doktrin-doktrin keislaman sesuai yang diyakininya. Pembahasan ini diarahkan untuk menjawab beberapapertanyaan seputar dunia pesantren, terutama terkait

bagaimana posisinya di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural. Selanjutnya dijelaskan pula seputar akar tradisi, reformasi, dan modernisasi terhadap pesantren di Indonesia, serta adanya indikasiketerkaitan beberapa pesantren dengan ideologi transnasional. Uraian-uraian tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan posisi pesantren yang sesungguhnya, yang pada akhirnya dapat dijadikan argumentasi yang memadai untuk membantah pandangan komunal tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

## **B. Indonesia Negara Multikultural dan Demokratis**

Indonesia merupakan negara yang identik dengan kemajemukan dalam hal budaya, kultur, etnis, ras, dan juga agama. Keragaman budaya dan kultur masyarakat Indonesia ini dalam pandangan Azra, merupakan anugerah yang harus dirawat dan difungsionalisasikan demi kemajuan bangsa dan Negara. Dengan begitu, dapat diartikan menjaga keragaman secara otomatis menjaga integritas Indonesia.<sup>14</sup> Selain itu, keragaman dan kemajemukan ini merupakan keniscayaan yang telah terbentuk jauh sebelum era penjajahan.<sup>15</sup> Dapat dikatakan, keniscayaan ini telah melekat dalam masyarakat Indonesiadari sejak lahir, dan menjadi identitas mereka sepanjang hidup. Dari sini, tidaklah salah jika dapat dianggap bercorak primordial, tidak mudah untuk berubah dan dirubah. Primordialisme semacam ini juga dapat dilihat dari hubungan antar keyakinan keagamaan yang berbeda. Semua ini tentu saja dapat melahirkan permasalahan apabila terjadi diskriminasi pada ranah publik yang tercermin dalam bentuk pemihakan pada kepentingan pribadi, golongan, suku, dan agama.

Keragaman masyarakat Indonesia ini untuk selanjutnya disatukan melalui penerapan sistem nasional, yang lebih cenderung dilaksanakan secara paksa pada era penjajahan dan masa Orde Baru.<sup>16</sup> Penerapan secara paksa biasanya didukung oleh sistem pemerintahan yang bercorak otoriter-militeristik, dengan dalih alat pemersatu atau sarana untuk merawat kesatuan sebuah Negara, yang pada akhirnya dapat melahirkan konflik keyakinan, kesukuan, bahkan pemberontakan. Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk, sering mengalami persoalan disintegrasi kebudayaan, terutama pada awal era reformasi, di mana terjadi krisis moneter, ekonomi, dan politik pada saat itu. Pengaruhnya sangat signifikan

terhadap budaya dan sosial masyarakat Indonesia, sehingga tidak aneh sikap keras dan anarki lebih dikedepankan ketimbang sikap sabar dan saling pengertian. Kondisi ini diperparah dengan timbulnya konflik kekerasan yang disebabkan oleh persoalan politik, etnis, ras, dan juga keyakinan, seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan, Ambon, Poso, dan lain-lain.<sup>17</sup> Tan Giok Lie mengungkapkan, dengan keragaman agama di Indonesia, konflik antara penganut, terutama antara Kristen dan Muslim, semakin meningkat.<sup>18</sup> Pluralisme menjadi isu yang sangat menantang di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Permasalahan sebenarnya terletak pada corak perkembangan politik keagamaan yang diterapkan oleh organisasi Islam radikal di Indonesia saat ini.

Dalam pandangan Furnivall, masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula pluralis yang memadai. Permasalahan ini tidak selesai dengan berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era reformasi, karena masih ada gejala primordialisme dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan. Keragaman budaya atau multikulturalisme yang terdapat di Indonesia harus disikapi secara arif melalui kebijakan yang menerima dan mengakui eksistensi budaya dan keyakinan yang majemuk.<sup>19</sup> Namun pada kenyataannya, sesuai dengan data laporan dari *the Wahid Institute*, terdapat peningkatan jumlah insiden terkait intoleransi keagamaan pada empat tahun belakangan, yaitu: 121 kasus di tahun 2009, 184 kasus di tahun 2010, 276 kasus di tahun 2011, dan 274 kasus di tahun 2012.<sup>20</sup> Hal ini diindikasikan akibat adanya klaim dari pihak-pihak radikal Muslim yang menganggap Islam sebagai mayoritas, sehingga sering terjadi kekerasan yang berhubungan dengan agama.

Persoalan kemajemukan ini tentunya harus segera diatasi, sehingga tidak menjadi 'api dalam sekam', yang sewaktu-waktu dapat membakar masyarakat Indonesia. Penelitian tentang multikulturalisme di Indonesia menunjukkan bahwa adanya keragaman dan kemajemukan budaya masih belum diakomodir dengan kebijakan pada tataran praktis, seperti kurikulum dalam dunia pendidikan. Sudah sepantasnya di Indonesia yang majemuk ini, konsep multikulturalisme lebih ditekankan dan diarahkan kepada pengakuan terhadap realitas tentang keragaman atau pluralitas budaya dalam sebuah masyarakat, dan harus ditunjang

melalui implementasi kebijakan dari pemerintah.<sup>21</sup> Multikulturalisme –dalam pandangan Azra-, merupakan suatu ideologi yang dapat dijadikan solusi yang tepat untuk mengatasi segala persoalan disintegrasi, mengingat penekanannya pada sikap penghargaan akan segala perbedaan yang ada di Indonesia.<sup>22</sup> Ideologi ini harus diterapkan oleh pemerintah dari mulai pusat sampai daerah, dan dipraktekkan dalam segala kebijakan yang dikeluarkannya. Penerapan ideologi multikulturalisme dapat dilakukan seiring berjalannya proses demokrasi, wawasan kebangsaan, serta hubungan antara masyarakat, baik dalam skala individu, kelompok, ataupun pada tataran pranata nasional, sosial, dan sukubangsa. Dari sini pentingnya pranata pendidikan sebagai media penanaman dan pengintegrasian ideologi multikulturalisme ke dalam sistem kurikulum, dan selanjutnya diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari mulai SD sampai Perguruan Tinggi.

Gagasan mengenai multikulturalisme demokratis merupakan hal baru dan belum menjadi wacana publik di Indonesia. Pada kenyataannya gagasan ini harus diwujudkan segera mungkin melalui program pendidikan multikultural yang sistematis dan berkelanjutan. Gagasan ini dapat memberikan masyarakat sebuah pemahaman bahwa di atas segala realitas keragaman masih terdapat nilai, norma, tingkah laku, simbol, dan lembaga yang menjadi kesamaan mereka. Pemahaman ini sangat penting untuk memupuk rasa keberterimaan masyarakat dan juga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Hal ini sudah barang tentu tidak mungkin terwujud tanpa program pendidikan yang tepat dan sistematis, juga mencakup seluruh aspek masyarakat. Melalui *civic education* dapat terwujud *civil society* yang menjadi modal sosial dan modal kultural terbentuknya suatu Negara yang berkeadaban.<sup>23</sup>

Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dapat mewadahi keragaman budaya, dan juga memiliki komitmen untuk menghapuskan pemahaman monokultural yang penuh prasangka dan bersifat diskriminatif. Model pendidikan ini mengharuskan adanya reformasi menyeluruh dalam aspek pendidikan, mulai dari materi sampai sistem pembelajaran. Reformasi total terhadap aspek pendidikan bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat mengisi segala potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, dan juga dapat

membongkar segala bentuk diskriminasi dalam proses pembelajaran.<sup>24</sup> Di samping itu, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia membutuhkan usaha yang komprehensif dari semua lini kehidupan masyarakat, baik secara formal ataupun informal. Tujuan pendidikan ini lebih tepat diarahkan sebagai media advokasi untuk mencapai masyarakat yang toleran dan jauh dari diskriminasi. Hal ini perlu diupayakan mengingat sistem pendidikan formal saat ini masih mengalami problematika dalam beberapa aspeknya, seperti: substansi, sumber daya, dan juga sistem pembelajarannya. Ditambah lagi intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari intrik politik dan kekuasaan, yang tentu saja menambah berat tantangan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia.<sup>25</sup>

Pendidikan multikultural merupakan gambaran dari suatu sistem pendidikan yang dapat menampung segala keragaman kebudayaan yang terjadi pada suatu masyarakat atau dunia secara keseluruhan. Model pendidikan ini berkembang seiring dengan gagalnya konsep pendidikan interkultural yang diterapkan di Amerika Serikat, karena cenderung terpusat pada individu bukan masyarakat secara umum. Pada kenyataannya konflik yang sering terjadi melibatkan masyarakat umum. Arah pendidikan ini lebih kepada isu-isu yang dirasakan oleh kelompok minoritas seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan. Yang lebih cenderung pada langkah pemberdayaan terhadap kelompok minoritas. Oleh karenanya, pendidikan multikultural harus mencakup isu-isu seperti toleransi, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, HAM, demokrasi, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan perumusan dan strategi yang perlu dikaji secara mendalam.<sup>26</sup>

Pada dasarnya sejak awal kemerdekaan, dan sejalan dengan kondisi masyarakatnya yang majemuk, para *founding fathers* lebih memilih sistem republik untuk Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi nasional melalui sila pertamanya menjamin kebebasan setiap agama. Dalam arti, seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk menjalankan agama yang diyakininya. Di samping itu, penggunaan motto *Bhineka Tunggal Ika*, menggambarkan bahwa identitas nasional dibangun pada konsep nasionalisme multikulturalisme, sebagai langkah untuk mewadahi masyarakat Indonesia yang pluralis.<sup>27</sup> Namun pada kenyataannya,

masih saja terjadi peningkatan jumlah masyarakat Muslim konservatif dan ekstrimis yang berusaha untuk merubah sistem kedaulatan Indonesia melalui ideologi mereka yang anti terhadap pluralisme. Oleh karenanya sebagai langkah antisipasi terhadap pertumbuhan kalangan ekstrimis di Indonesia, negara berusaha, seperti yang diungkapkan oleh Hefner, untuk memunculkan demokrasi dan tradisi masyarakat pluralis yang dibangun dari sumber tradisi keislaman, sebagai langkah untuk mengakomodasi demokrasi modern dan perubahan pluralisme.<sup>28</sup>

Tidak hanya sampai di situ, seruan-seruanterhadap demokrasi, pluralisme, dan toleransi keagamaan datang dari beberapa kalangan, seperti Nurcholis Madjid yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan martabat manusia bukan sekedar sejalan dengan ide demokrasi, hak asasi manusia, dan *civil society* saja, akan tetapi juga selaras dengan segala tuntutan dan kebutuhan manusia. Selain itu, beberapa organisasi non-pemerintah yang memainkan peran aktif terhadap perkembangan demokrasi dan pluralisme di Indonesia, seperti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS), dan beberapa organisasi lainnya.<sup>29</sup> Meskipun di sisi lain, organisasi-organisasi ini juga menghadapi perlawanan yang cukup kuat dari kalangan masyarakat Muslim konservatif. Usaha-usaha untuk mendukung demokrasi juga datang dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu: NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini sama-sama konsisten dalam memegang komitmen mereka terhadap reformasi demokrasi, dan turut berpartisipasi dalam proses politik. Keduanya juga bersuara keras terhadap pendukung atau penyeru pembentukan negara Islam, di mana mereka lebih mengedepankan pembentukan masyarakat Muslim yang identik dengan inklusivitas dan toleransi keagamaan.<sup>30</sup> Keberadaan dua organisasi keislaman ini di pihak pemerintah sangat penting, mengingat keduanya memiliki akses dan pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah – sejak era penjajahan- telah memainkan peran penting dalam pendirian sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sementara mayoritas pesantren di Indonesia berafiliasi kepada NU.

### **C. Lembaga Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Pasca kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem pendidikan yang dualistik. Dualisme sistem pendidikan nasional ini meliputi sekolah umum yang identik dengan 'sekuler', dan juga sekolah swasta, yang di dalamnya terdapat lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren). Secara umum dapat dikatakan, dengan pemberlakuan sistem pendidikan sekuler di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan Islam masih berada di luar mainstream sistem pendidikan nasional. Dengan begitu lembaga pendidikan Islam tidak menerima dukungan dan supervisi dari pemerintah, sehingga mutu pendidikannya jauh lebih rendah dari sekolah umum.<sup>31</sup> Kondisidualisme dalam sistem pendidikan nasional ini lebih jauh membuat lembaga pendidikan Islam masih termarginalkan, mengingat sampai menjelang awal tahun 1970-an pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensinya, sehingga tidak ada inisiatif dari pihak pemerintah untuk melakukan reformasi dan modernisasi lembaga-lembaga tersebut.

Marjinalisasi lembaga pendidikan Islam juga dapat dikatakan akibat adanya pandangan yang datang dari kalangan tokoh Muslim sendiri, di mana tidak menginginkan dimasukkannya materi umum dalam sistem pendidikan Islam, terutama pesantren. Seperti diketahui, sebagian besar pesantren dan madrasah masih mengedepankan materi keagamaan dalam kurikulumnya, dan berbasis kepada kearifan Kyai sebagai pemimpinnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan yang datang dari kalangan para Kyai, ketika pemerintah Orde Baru mencoba untuk menyatukan sekolah-sekolah di Indonesia di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 1970-an.<sup>32</sup> Yang pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 1975 sebagai solusi alternatif akan kondisi tersebut. Pada dasarnya, SKB tiga menteri ini dikeluarkan untuk mengikis 'gaps' yang terjadi pada sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini, madrasah dapat disejajarkan eksistensinya dengan sekolah umum, asalkan dalam kurikulumnya terdapat materi umum sekurang-kurangnya tujuh puluh persendari seluruh kurikulum. Solusi yang diberikan pemerintah ini tidak begitu saja diterima oleh semua kalangan,

dengan alasan bahwa kurikulum yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan jasa dan tujuan pesantren, masih banyak madrasah di beberapa pesantren yang memilih untuk menetapkan kurikulumnya secara mandiri, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren Pabelan di Muntilan, dan sebagainya.

Dari sini dapat disimpulkan, sampai terbitnya SKB tiga menteri, pengakuan pemerintah hanya terbatas pada sistem madrasah saja. Selanjutnya, penolakan kalangan Kyai terhadap penggabungan madrasah dan pesantren ke dalam naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilandasi dua asumsi; *pertama*, trauma masa silam yang dialami para tokoh Muslim, ketika komunis memegang peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan *kedua*, arogansi yang ditunjukkan oleh para aparat Departemen Pendidikan, di mana pejabat di tingkat bawah belum mengakui keberadaan sekolah Islam.<sup>33</sup> Sementara untuk pesantren itu sendiri, sampai lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, masih dianggap sebagai pendidikan keagamaan, sehingga belum dianggap setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

#### **D. Pesantren; Akar Tradisi dan Modernisasi**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, yang dalam pandangan Mastuhu, bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat.<sup>34</sup> Secara historis, pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia, dan sudah dikenal sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Hal ini senada dengan uraian Nurcholis Madjid yang menyatakan, lembaga pesantren telah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia pra-Islam. Islam datang dan tinggal mengislamkannya.<sup>35</sup> Dengan kata lain, pesantren seperti yang dikatakan Nurcholis Madjid, tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, dalam hal ini Azra berkomentar, pesantren memiliki akar sosiohistoris yang cukup kuat, sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakatnya, dan sekaligus bertahan di tengah berbagai gelombang perubahan.<sup>36</sup>

Pesantren dalam pandangan Clifford Geertz, dapat dianggap sebagai sekolah al-Qur'an yang terisolasi dari pusat dunia Islam yang berada di Timur Tengah dan juga dari tradisi para intelektualnya. Dunia pesantren merefleksikan praktik-praktik keagamaan yang berbeda dengan akar tradisi Islam ortodok, tetapi lebih cenderung ke arah animistis dan tradisi Hindu-Buddha. Berbeda dengan Geertz, dalam pandangan Dhofier, di dalam pesantren diajarkan teks-teks Arab klasik secara mendalam, selain juga turut berpartisipasi dalam kehidupan modern melalui reformasi terhadap sistem pendidikannya.<sup>37</sup> Secara historis dapat disebutkan pula, pesantren selalu berada dalam geliat pergulatan politik yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Di era kolonialisme, pesantren secara aktif melakukan aksi-aksi protes terhadap rezim yang berkuasa, sehingga lembaga ini identik dengan separatisme. Meskipun hal itu berubah terutama pada saat kemerdekaan, di mana pesantren tidak lagi dianggap sebagai lembaga separatis, melainkan lebih kepada lembaga kooperatif yang turut berperan aktif dalam proses kemerdekaan.

Banyak pesantren yang terkenal pada masa penjajahan, seperti: pesantren Tebuireng di Jombang, Pesantren Manba'ul Ulum di Solo, Pesantren Gontor di Ponorogo, Pesantren al-Khairiyah di Banten dan lainnya. Pesatnya perkembangan pesantren pada masa ini antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) para ulama dan kyai mempunyai kedudukan yang kukuh di lingkungan kerajaan dan kraton, yaitu sebagai penasihat raja atau sultan. Oleh karena itu, pembinaan pondok pesantren mendapat perhatian besar dari para raja dan sultan. Bahkan beberapa pesantren didirikan atas dukungan kraton, seperti pesantren Tegal Sari di Jawa Timur, yang diprakarsai oleh Susuhunan Pakubuworo II. (2) kebutuhan umat Islam akan sarana pendidikan yang mempunyai ciri khas keislaman juga semakin meningkat, sementara sekolah-sekolah Belanda pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. (3) hubungan transformasi antara Indonesia dan Mekkah semakin lancar sehingga memudahkan pemuda-pemuda Islam dan Indonesia menuntut ilmu ke Mekkah. Sekembalinya ke Tanah Air, mereka biasanya langsung mendirikan pesantren di daerah asalnya dengan menerapkan cara-cara belajar seperti yang dijumpainya di Mekkah.<sup>38</sup> Pesantren pada masa itu memiliki kekhasan tertentu

yang membuatnya berbeda dengan pesantren lainnya. Kekhasan tersebut merujuk kepada disiplin ilmu yang diajarkan oleh Kyainya, sehingga muncullah istilah pesantren khusus ilmu hadis, fikih, bahasa Arab, tafsir, tasawuf, dan lain sebagainya.

Pola pembelajaran 'ala' pesantren dalam pandangan Hefner, terbagi menjadi tiga bagian, pengajian al-Qur'an, belajar di Pondok, dan sekolah di Madrasah.<sup>39</sup> Pada dasarnya, ketiga sistem pembelajaran ini merupakan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Perbedaannya terletak pada kedalaman muatan keislaman, terutama jika dikaitkan dengan muatan-muatan umum. Pengajian al-Qur'an di musholla (surau) merupakan pendidikan tingkat awal yang memberikan pengajaran tata cara membaca al-Qur'an untuk anak-anak kecil, yang dibimbing oleh seorang ustad, dan biasanya setelah sholat Maghrib. Belajar di pondok (pesantren) merupakan lembaga awal di tanah air yang memberikan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman tingkat lanjutan. Biasanya pada setiap pesantren terdapat kiayi yang menjadi poros kegiatan di dalamnya, setiap aktivitas dan proses pembelajaran dilaksanakan di bawah bimbingan kiayi. Muatan kurikulum yang diberikan hampir semuanya berkaitan dengan ilmu agama, dan pola pembelajarannya belum terbentuk secara sistematis. Selanjutnya muncul madrasah yang merupakan perpaduan antara sistem pesantren dan juga sekolah umum, sehingga muatan agamanya berkurang sebagai bagian adaptasi muatan umum yang harus diadopsinya. Sistem pembelajaran di madrasah sudah sistematis, dan dapat dikatakan telah mengadopsi sistem pembelajaran Barat.

Pengamatan lebih seksama terhadap varietas pesantren pada beberapa dasarwasa menyimpulkan bahwa pesantren dapat dipilah menjadi tradisional dan modernis, yang dapat dinyatakan bahwa pesantren tradisional lebih kuat berafiliasi kepada NU, sedangkan pesantren modern merupakan wujud pembaharuan yang diusung oleh Muhammadiyah.<sup>40</sup> Perbedaan tersebut berakar pada pandangan ideologis dan praktek keislaman yang dianut oleh masing-masing Ormas, di mana pada awal era kemerdekaan telah memunculkan perdebatan-perdebatan sengit di antara keduanya, bahkan hingga masa Orde Baru. Lebih lanjut dapat dikatakan, klasifikasi ini tidak baku dan mengikat, karena pada kenyataannya terdapat pelaksanaan sistem madrasah di dalam lembaga pesantren.

Pesantren sebagai lembaga yang mengakar di dalam tradisi masyarakat Indonesia semakin hari mendapatkan apresiasi dan dapat bertahan di tengah-tengah perubahan zaman. Hal ini dalam pandangan Azra, secara implisit mengisyaratkan bahwa dunia Islam tradisi dalam aspek-aspek tertentu masih relevan di tengah deru modernisasi. Pesantren yang awalnya sebagai *rural based institution* berkembang menjadi lembaga pendidikan urban.<sup>41</sup> Pesantren dalam prediksi Geertz, akan tergerus oleh modernitas, dan menganggap Kyai tidak dapat menjadi agen penyambung antara Indonesia dan modernisasi.<sup>42</sup> Namun prediksi ini agaknya tidak menjadi kenyataan, di mana pesantren sampai saat ini masih dapat menunjukkan eksistensinya seiring dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Tradisi dan modernisasi pendidikan pesantren berjalan beriringan, atau secara inheren bersama proses politik. Lukens-Bull menganggap, *the imagining and (re)invention of tradition and the imagining and (re)invention of modernity are two sides of the same coin*.<sup>43</sup> Dalam pandangan ini, pendidikan merupakan bagian penting bagaimana suatu masyarakat menghadapi modernisasi dan globalisasi.

Seiring dengan perubahan di era modern ini, banyak pesantren yang melakukan reformasi-reformasi terhadap tradisi dan kurikulumnya. Hal ini dimulai dengan pemberlakuan sistem madrasah, dan pengajaran materi-materi umum di dalam lembaga pesantren.<sup>44</sup> Implementasi sistem madrasah di wilayah pesantren merupakan perubahan penting, dan dianggap sebagai perimbangan terhadap pesatnya pertumbuhan sekolah-sekolah yang memakai sistem pendidikan Barat. Dengan sistem madrasah, pesantren banyak mencapai kemajuan yang terlihat dan bertambahnya jumlah pesantren. Selanjutnya pada tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar pondok pesantren di Yogyakarta, disepakati perlunya memasukkan pendidikan dan pelajaran keterampilan pada pesantren seperti pertukangan, pertanian, peternakan, dan keterampilan lainnya.<sup>45</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 1975 yang menetapkan mata pelajaran umum di madrasah

sekurang-kurangnya harus tujuh puluh persen dari seluruh kurikulum.

Dalam hal modernisasi, Pondok Modern Gontor dapat dijadikan contoh dalam pelaksanaan reformasi sistem kurikulumnya, sehingga berhasil meraih apresiasi dari berbagai kalangan. Meskipun Gontor berada di luar sistem pendidikan nasional, keberadaannya sangat menginspirasi pesantren lainnya. Sebagai contoh, Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta, Darunnajah, Darul Falah, dan Tebuireng, secara sadar melakukan perubahan-perubahan dalam institusinya. Pesantren-pesantren ini mengadopsi kurikulum madrasah, sehingga terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.<sup>46</sup> Meskipun di sisi lain, masih terdapat beberapa pesantren yang melakukan reformasi institusinya secara mandiri, dan di luar sistem pendidikan nasional. Selanjutnya bersamaan dengan perubahan iklim politik pada tahun 1990-an, penekanan aktivitas pesantren lebih diarahkan kepada pengembangan masyarakat sipil yang demokratis. Beberapa pesantren mulai sadar untuk mengarahkan kegiatan pendidikan dan sosialnya sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik kritis dari masyarakat terhadap isu-isu, seperti: hak asasi manusia, pluralisme, keadilan politik dan sosial, demokrasi, dan toleransi agama. Pada tataran praktisnya, pesantren-pesantren ini dengan menggunakan teks-teks keislaman klasik, mengarahkan kegiatan pendidikannya untuk menegaskan pemikiran dan praktek, seperti: anti kekerasan, kesopanan, keadilan, dan pluralisme.<sup>47</sup> Dengan begitu dapat dikatakan, institusi-institusi ini tidak hanya terlibat dalam dimensi teoritis dan intelektual pada saat membangun masyarakat pluralis di negara yang mayoritas beragama Islam, namun juga terlibat aktif dalam mempersiapkan siswa-siswanya untuk hidup sebagai pribadi Muslim di dalam keragaman yang ada, serta memberdayakan mereka melalui cara yang konkrit untuk berpartisipasi dalam proses transformasi sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya, dapat diindikasikan adanya reformasi atau perubahan ideologi dan metodologi yang terjadi pada beberapa pesantren. Hal ini tentu saja diikuti dengan perubahan kurikulum (materi) yang disiapkan untuk para santri. Perubahan dalam sistem pesantren ini jika dianalisis lebih mendalam, selalu berkaitan erat dengan figur Kyai (pemimpin) sebagai pendiri pesantren. Dalam hal ini figur Kyai dapat dilihat

dari dua sisi, sebagai individu Muslim, dan juga sebagai warga Indonesia.<sup>48</sup> Sebagai individu Muslim, seorang Kyai tentu saja berusaha melaksanakan ideologi-ideologi keagamaan yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ideologi ini ditanamkan kepada para santri yang belajar di pesantrennya. Sebagai warga Indonesia, tentu saja dapat dilihat bagaimana posisi Kyai terhadap pemerintah melalui pandangan-pandangan yang diutarakannya. Tentu saja, pandangan ini tidak terlepas dengan latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman hidup yang dialaminya.

Reformasi ideologi pada beberapa pesantren di Indonesia - dalam pandangan Azra yang telah dikutip oleh Arief Subhan- semakin menguat, terutama dengan realitas kebangkitan gerakan salafi di Indonesia, yang disebabkan oleh beberapa faktor penting.<sup>49</sup> *Pertama*, peran penting Arab Saudi dalam sukses dakwah gerakan salafi berkat pengaruhnya yang semakin meningkat di kalangan dunia Islam pada 1970-an. Didukung *booming* minyak bumi, Arab Saudi mulai memberikan dukungan penyebaran doktrin Wahhabisme ke seluruh dunia Islam. Pendirian organisasi filantropi Rābiṭah al-‘Alam al-Islāmī pada 1967 semakin mempercepat penyebaran Wahhabisme ke seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. *Kedua*, perkembangan pesat gerakan Ikhwān al-Muslimūn, yang lahir di Mesir pada 1928, dengan mengandalkan pola relasi interpersonal, jaringan informal, dan kelompok kecil kajian keislaman di masjid. Melalui pola ini mereka tidak hanya berhasil merekrut dan mendidik kader militan, tetapi juga sukses mengembangkan jaringan Ikhwān al-Muslimūn di beberapa negara Arab. *Ketiga*, sukses revolusi Iran pada 1979 juga memainkan peranan penting dalam memberikan kepercayaan diri di kalangan muslim berhadapan dengan dominasi politik Barat.

Selain itu, kebangkitan gerakan salafi di Indonesia juga mendapat dukungan dari manajemen politik Orde Baru. Di mana kelompok Muslim seperti apa yang diutarakan oleh Donald J. Potter, sejak semula sudah menjadi target “strategi korporatis” (*corporatist strategy*) dari Orde Baru.<sup>50</sup> Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru berusaha menarik partai-partai politik, termasuk partai berbasis ideologi Islam, sebagai bagian dari negara dengan melakukan de-ideologisasi dan menciptakan sebuah lingkungan yang bersifat nonpolitik. Proyek Pancasila sebagai satu-satunya

asas diperluas tidak hanya pada partai-partai politik, tetapi juga seluruh organisasi sosial dan keagamaan, termasuk organisasi kemahasiswaan. Islam menyebabkan gerakan Islam Indonesia bergeser dari politik ke dakwah.<sup>51</sup> Di sisi lain, pada periode Orde Baru, pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh para aktivis Muslim adalah melakukan proses internalisasi dan konsolidasi ke dalam dengan melakukan kaderisasi dan rekrutmen yang hati-hati, cermat, dan terukur. Mengikuti pola yang diterapkan gerakan Ikhwān al-Muslimūn dan Salafi di negara-negara lain, seperti Yordania. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa gerakan-gerakan ini kemudian muncul di dalam kegiatan-kegiatan pengajian berskala kecil, baik itu melalui masjid kampus, bimbingan belajar, dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia, Damanik menyebut kelompok kecil dengan *jamaah masjid* dan *usroh* dalam sistem *sel networking*.

Dalam konteks keterkaitan pesantren dengan ideologi-ideologi transnasional, Martin van Bruinessen melakukan penelitian, di mana pesantren dianalisis melalui ideologi Kyai, metodologi, dan kurikulum pembelajarannya. Penelitian ini mengambil korpus beberapa pesantren terkenal di Indonesia, seperti: Gontor, Al-Mukmin Ngruki, Al-Zaytun, dan Hidayatullah. Hasilnya melahirkan fenomena baru terutama dengan varietas dan model pesantren di Indonesia. *Pertama*, jenis pesantren yang melakukan reformasi dalam muatan pembelajaran dan metodologinya, dan tidak berafiliasi terhadap Ormas tertentu (NU atau Muhammadiyah), serta tidak terlibat dalam urusan politik, sebagai contoh Pondok Pesantren Gontor. *Kedua*, jenis pesantren yang melakukan reformasi pembelajaran, Pimpinan (pendiri) pesantren tersebut pada awalnya merupakan kader organisasi anti-pemerintah Indonesia (DI/TII), tetapi pada tahap selanjutnya bersikap akomodatif terhadap pemerintah, seperti Al-Zaytun dan Hidayatullah. Dan *ketiga*, jenis pesantren yang dibangun oleh tokoh-tokoh reformis yang bersebrangan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Figur pemimpinnya terlibat langsung dan memiliki keterikatan dengan organisasi internasional yang mengusung visi untuk membentuk pemerintahan Islam seperti JI, seperti Al-Mukmin Ngruki, ditambah pula dengan keberadaan beberapa pelaku yang terduga melakukan tindak pidana terorisme pernah berada dan belajar di pesantren tersebut, sehingga

secara otomatis identitas seperti ini tersematkan pula pada jenis pesantren yang seperti itu.<sup>52</sup>

Pada akhirnya dapat dikatakan, modernisasi sistem dan pola pembelajaran pesantren yang masih dilakukan oleh beberapa kalangan reformis sampaisaat ini, selalu berkaitan dengan ideologi dan pergerakan sosial (*social movement*) yang diyakininya. Beberapa kalangan reformis meyakini bahwa jalur pendidikan dapat digunakan sebagai ajang pergerakan sosial, dan penanaman ideologi mereka terhadap masyarakat luas, terutama pada awal era reformasi. Pandangan ini tentu saja dilandasi latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan mereka, sehingga semakin menambah varietas model pesantren, dan tidak hanya didominasi oleh NU dan Muhammadiyah. Pentingnya jalur pendidikan sebagai pergerakan sosial telah membawa PKS dan Hidayatullah, untuk membuka lembaga-lembaga pendidikan yang sekaligus sebagai bentuk kaderisasi ideologi dan pandangan politik mereka. Varietas pesantren terutama dalam kaitannya dengan ideologi yang dianut oleh NU, Muhammadiyah, PKS, dan Hidayatullah, masih dapat menerima dan bersatu dengan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlaku di Tanah air. Akan tetapi pada beberapa tahun belakangan, mulai muncul di tengah masyarakat Indonesia ideologi-ideologi yang memiliki pandangan bahwa sistem demokrasi bertolak belakang dengan masyarakat Islam. Demokrasi merupakan produk Barat, dan bertujuan untuk memperkuat hegemoni imperialisme. Ideologi-ideologi ini ditanamkan oleh penganutnya melalui pengajian-pengajian, dan juga jalur pembelajaran melalui lembaga pendidikan. Situasi ini tentu saja perlu segera diantisipasi dan disikapi oleh pemerintah Indonesia secara bijaksana, sehingga di kemudian hari tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis.

## **E. Penutup**

Sejak awal pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di luar sistem pendidikan nasional, sehingga tidak terjadi supervisi dan dukungan dari pihak pemerintah. Sebagai lembaga independen, tentu saja masing-masing pesantren memiliki kewenangan untuk memilih dan menerapkan ideologi yang hendak ditransformasikannya kepada para santri. Dalam konteks ini, ada

beberapa ‘oknum’ yang juga menggunakan lembaga pendidikan pesantren sebagai basis kaderisasi doktrin-doktrin keislaman yang diyakininya. Hal ini yang menyebabkan adanya indikasi keterkaitan ‘pesantren’ dengan isu-isu radikalisme, terutama pasca keruntuhan rezim Soeharto. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar pesantren masih tetap berdiri di pihak pemerintah, dan berperan aktif dalam menyuarakan isu demokrasi, anti kekerasan, pluralisme, dan sebagainya.

### Catatan akhir:

---

<sup>1</sup>Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

<sup>2</sup>Florian Pohl, “Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia,” *Comparative Education Review*, Vol. 50, No. 3, (August 2006): 390. Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Comparative and International Education Society Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/503882> Accessed: 11/12/2013 19:03; Lihat juga, Robert W. Hefner, “The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia,” On *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, edited by Robert W. Hefner (USA: University of Hawai’i Press, 2009), 1.

<sup>3</sup>Florian Pohl, “Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia,” 389.

<sup>4</sup>Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, 2.

<sup>5</sup>Muhammad Sirozi, “The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia,” *The Muslim World*, Vol. 95, (January 2005): 81-82.

<sup>6</sup>Greg Fealy, “Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?,” *Southeast Asian Affairs*, (2004): 104. Published by: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/27913255>. Accessed: 11/12/2013 19:32 Lihat juga, Muhammad Sirozi, “The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia,” 81-82.

<sup>7</sup>If a willingness to implement *Shari’ah* is an indication of Islamic radicalism, the rising trend of Islamic radicalism in Indonesia seems to be very strong. In 2002, the Centre for Islamic and Social Studies of Syarif Hidayatullah Jakarta State Islamic University conducted a survey on the development of Islamic radicalism in Indonesia. The survey indicated that supporters of *Shari’ah* law have reached 71 percent, rising by 10 percent from the previous year (2001). The survey also indicated that the supporters of Islamism in Indonesia after September 11, 2001 have grown in number by over 18.8 million in a year with a total number of 133.9. Lihat juga, Mohamed Nawab Bin Mohamed Osman, “Transnational Islamism and Its Impact in Malaysia and Indonesia,” *Middle East Review of International Affairs*, Vol. 15, No. 2 (June 2011): 47-48.

---

<sup>8</sup>Muhammad Sirozi, "The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia," 81-82.

<sup>9</sup>Tan Giok Lie, "The Context and Challenges of The Church's Educational Ministry in Indonesia," *Christian Education Journal*, Series 3, Vol. 10, (2013): 233.

<sup>10</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 38.

<sup>11</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 391.

<sup>12</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 391.

<sup>13</sup>Muhammad Sirozi, "The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia," 81.

<sup>14</sup>Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 5-9.

<sup>15</sup>Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme," *Makalah di paparkan pada Seminar Sehari "Mengembangkan Akselerasi Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Jangka Menengah Indonesia"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Juli 2004.

<sup>16</sup>Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme," *Makalah di paparkan pada Seminar Sehari "Mengembangkan Akselerasi Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Jangka Menengah Indonesia"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Juli 2004.

<sup>17</sup>Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 5-9.

<sup>18</sup>Tan Giok Lie, "The Context and Challenges of The Church's Educational Ministry in Indonesia," 234.

<sup>19</sup>Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 10-16.

<sup>20</sup>Tan Giok Lie, "The Context and Challenges of The Church's Educational Ministry in Indonesia," 234.

<sup>21</sup>Melani Budianta, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum," *Tsaqafah*, Vol. 1, No. 2, (2003): 9.

<sup>22</sup>Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 17-23.

<sup>23</sup>Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 17-23.

<sup>24</sup>Melani Budianta, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum," 13-14.

<sup>25</sup>Melani Budianta, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum," *Tsaqafah*, Vol. 1, No. 2, (2003): 15-16.

<sup>26</sup>Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 24-28.

<sup>27</sup>Tan Giok Lie, "The Context and Challenges of The Church's Educational Ministry in Indonesia," 236.

<sup>28</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 396.

<sup>29</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 396.

---

<sup>30</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 397.

<sup>31</sup>Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and The Modernization of Indonesian Islamic Schools," 37.

<sup>32</sup>Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and The Modernization of Indonesian Islamic Schools," 36.

<sup>33</sup>Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree and The Modernization of Indonesian Islamic Schools," 38-39.

<sup>34</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pesantren* (Jakarta: Sen INIS YX, 1994), 6.

<sup>35</sup>Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 2.

<sup>36</sup>Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektula Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 87.

<sup>37</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 399.

<sup>38</sup>Dewan redaksi EI, *Ensiklopedi*, h. 10.

<sup>39</sup>Robert W. Hefner, "Islamic Schools, Social Movements, and Democracy in Indonesia," on *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, edited by Robert W. Hefner (USA: University of Hawai'i Press, 2009), 59-62.

<sup>40</sup>Martin van Bruinessen, "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia," on *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ed by Farish A. Noor, Yoginder Sikand, and Martin van Bruinessen (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), 218. Lihat juga, Liem Soei Liong, "Indonesian Muslims and the State: Accommodation or Revolt?," *Third World Quarterly*, Vol. 10, No. 2 (Apr., 1988), 888-889. Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3992671>. Accessed: 11/12/2013 19:15

<sup>41</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), 102.

<sup>42</sup>Ronald A. Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia," *Anthropology & Education Quarterly*, Vol. 32, No. 3, (Sep., 2001): 350. Published by: Wiley on behalf of the American Anthropological Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3195992>. Accessed: 11/12/2013 19:21

<sup>43</sup>Ronald A. Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia," 351.

<sup>44</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 399-400.

<sup>45</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), 102.

<sup>46</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 400.

<sup>47</sup>Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia," 402.

---

<sup>48</sup>Martin van Bruinessen, "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia," 219.

<sup>49</sup>Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, 282.

<sup>50</sup>Donald J. Potter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: RoutledgeCurzon, 2002), 38.

<sup>51</sup>Faisal Ismail, "Pancasila as the Sole Basis for all Indonesian Political Parties and for all Mass Organizations: An Account of Muslim Response", *Studia Islamika*, No. 4, Vol. III (1996), 1-92.

<sup>52</sup>Martin van Bruinessen, "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia," 217-245.

## DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, *Esai-esai Intelektula Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

-----, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

-----, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999.

Bruinessen, Martin van, "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia." on *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. ed by Farish A. Noor, Yoginder Sikand, and Martin van Bruinessen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Budianta, Melani. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum." *Tsaqafah*, Vol. 1, No. 2, (2003)

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Fealy, Greg. "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?" *Southeast Asian Affairs*, (2004): 104-121  
Published by: Institute of Southeast Asian Studies

---

(ISEAS) Stable URL:  
<http://www.jstor.org/stable/27913255>. Accessed:  
11/12/2013 19:32

Hefner, Robert W. "The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia." On *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. edited by Robert W. Hefner. USA: University of Hawai'i Press, 2009.

----- . "Islamic Schools, Social Movements, and Democracy in Indonesia." on *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, edited by Robert W. Hefner. USA: University of Hawai'i Press, 2009.

Ismail, Faisal. "Pancasila as the Sole Basis for all Indonesian Political Parties and for all Mass Organizations: An Account of Muslim Response". *Studia Islamika*, No. 4, Vol. III (1996), 1-92.

Lie, Tan Giok. "The Context and Challenges of The Church's Educational Ministry in Indonesia." *Christian Education Journal*, Series 3, Vol. 10, (2013): 233-241.

Liong, Liem Soei. "Indonesian Muslims and the State: Accommodation or Revolt?." *Third World Quarterly*, Vol. 10, No. 2, Islam & Politics (Apr., 1988), 869-896 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3992671>. Accessed: 11/12/2013 19:15

Lukens-Bull, Ronald A.. "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia." *Anthropology & Education Quarterly*, Vol. 32, No. 3, (Sep., 2001): 350 (350-372) Published by: Wiley on behalf of the American Anthropological Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3195992>. Accessed: 11/12/2013 19:21

Madjid, Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Mastuhu. *Dinamika Sistem Pesantren*. Jakarta: Sen INIS YX, 1994.

- Nawab, Mohamed Bin Mohamed Osman. "Transnational Islamism and Its Impact in Malaysia and Indonesia." *Middle East Review of International Affairs*, Vol. 15, No. 2 (June 2011): 42-52.
- Pohl, Florian. "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the *Pesantren* Tradition in Contemporary Indonesia." *Comparative Education Review*, Vol. 50, No. 3, (August 2006): 389-409 Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Comparative and International Education Society Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/503882> Accessed: 11/12/2013 19:03
- Potter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: RoutledgeCurzon, 2002.
- Sirozi, Muhammad. "The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia." *The Muslim World*, Vol. 95, (January 2005): 81-120.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suparlan, Parsudi. "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme." *Makalah di paparkan pada Seminar Sehari "Mengembangkan Akselerasi Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Jangka Menengah Indonesia," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Juli 2004.*
- Zuhdi, Muhammad. "The 1975 Three-Minister Decree and The Modernization of Indonesian Islamic Schools." *American Educational History Journal*, Vol. 32, No. 1, (2005):